



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

## **JAWABAN EKSEKUTIF**

TERHADAP

### **PEMANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI**

DALAM RAPAT PARIPURNA I TAHUN 1997 / 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN PERHITUNGAN APBD

TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997



LAMONGAN, 13 MEI 1997

## DAFTAR TABULASI PERTANYAAN FRAKSI-FRAKSI DPRD

No.	PERMASALAHAN		JAWABAN	
	URAIAN	HALAMAN	SEKTOR	HALAMAN
	<b><u>FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA</u></b>			
1.	<i>Peningkatan PAD</i> Tentang Retribusi Sewa Tanah Negara.	7	V	27
2.	<i>Tanah Kas Desa</i> Keberadaan Tanah Kas Desa untuk kelancaran pengelolaan pemerintahan dan pembangunan Desa.	7	XI	38
3.	<i>Masalah Pariwisata</i> Perlunya investasi dari Pihak Ketiga/Swasta dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana obyek-obyek wisata di Kabupaten Lamongan.	8	VIII	34
4.	Tentang IMB Sekolah Tsanawiyah di Kecamatan Sukorame.	9	XII	40
5.	Tentang Jaringan/Pemasangan Telpon di Wilayah Kecamatan Bluluk.	9	VIII	36
6.	Proses pengurusan Akte Kelahiran untuk pernikahan di Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang.	10	XII	40-41

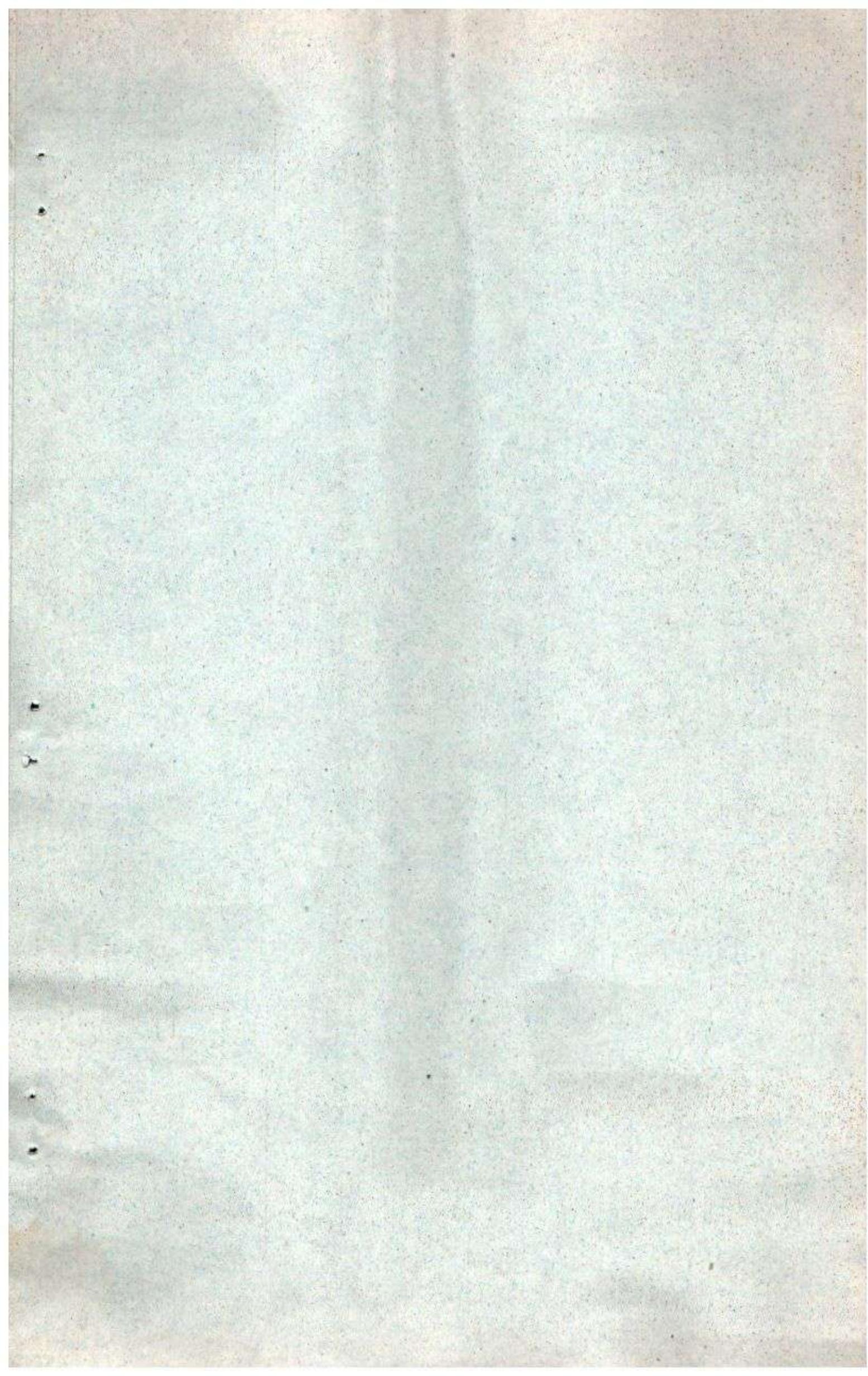
No.	PERMASALAHAN		JAWABAN	
	URAIAN	HALAMAN	SEKTOR	HALAMAN
	<b>FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN</b>			
1.	<b>Sektor Industri</b>			
	a. Keberadaan produk-produk industri rumah tangga yang berskala fabrican di Kabupaten Lamongan.	13-14	I	7
	b. Pengembangan program pemberdayaan ekonomi – rakyat melalui paket Tamyamsang.	14	I	7-8
	c. Keberadaan Proyek Tamyamsang sebagai proyek kawasan Agro Industri di Kecamatan Karanggeneng.	14-15	I	8-9
2.	<b>Sektor Pertanian dan Kehutanan.</b>			
	a. Pengembangan perluasan program tanaman hidropo- nik di Kabupaten Lamongan.	15	II	11-12
	b. Perlu adanya usaha diversifikasi dan optimalisasi lahan pertanian.	15-16	II	13
	c. Usaha Penangkaran Benih Padi sebagai salah satu usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya.	16	II	13-14
3.	<b>Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi.</b>			
	a. Tentang rencana program pemeliharaan dan pengembangan saluran Irigasi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.	16-17	III	20-21
	b. Tentang rencana pengembangan yang berkaitan dengan normalisasi dan optimalisasi kemanfaatan Waduk Jabung sebagai bangunan penyediaan air baku dan fungsi irigasi lainnya.	17	III	21-22
4.	<b>Sektor Tenaga Kerja.</b> Keberadaan Upah Tenaga Kerja	18	IV	22
5.	<b>Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi.</b> <i>Sub Sektor Perdagangan</i>			
	a. Penyesuaian Rencana Tata Ruang Kota.	18-19	V	23
	b. Tentang penataan dan pengaturan Pusat Perbelanjaan di Kota Lamongan.	19	V	23-24
	<i>Sub sektor Pengembangan Usaha Daerah.</i>			
	a. Keberadaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya dalam upaya memperkuat posisi keuangan daerah.	19-20	V	24
	b. Rencana pemilikan saham Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya.	20	V	24-25
	<i>Sub Sektor Koperasi</i>			
	a. Keberadaan Perkoperasian di Kabupaten Lamongan.	20-21	V	27-28
	b. Kebijakan perkembangan Koperasi di Kabupaten Lamongan dan perlu upaya mitra usaha.	21-22	V	29
6.	<b>Sektor Pertambangan dan Energi</b> <i>Sub Sektor Listrik Pedesaan.</i> Tentang Listrik Masuk Desa di Desa Girik dan Desa Tlemang Kecamatan Ngimbang.	22-23	VII	34

No.	PERMASALAHAN		JAWABAN	
	URAIAN	HALAMAN	SEKTOR	HALAMAN
	<b><u>FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN</u></b>			
	<b><u>SEKTOR INDUSTRI</u></b>			
	<b><u>SUB SEKTOR INDUSTRI</u></b>			
1.	Kwalitas produksi, penyusunan profil industri kecil dan jumlah industri industri kecil yang didanai proyek sebesar 30 juta	9	I	9-10
2.	Prospek produksi songkok dari Desa Bojosari Kalitengah dan fasilitas bantuan yang diperoleh dari Pemerintah.	9	I	10-11
3.	1. Kelengkapan desa industri kecil akan tempat promosi dan organisasi kelompok pengrajin desa. 2. Hendaknya segera diadakan perintisan desa kerajinan untuk berkoperasi.	10	I	11
4.	<b><u>SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN</u></b>			
	<b><u>SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN</u></b>			
	1. Sejauhmana keberhasilan proyek penangkaran benih padi di Kabupaten Lamongan. 2. Perlu penambahan petugas pengawasan teknis di lapangan. 3. Uji kualitas hendaknya lebih selektif 4. Perluasan penangkaran benih TA. 1997/1998 untuk mencukupi kekurangan di Kabupaten Lamongan	10-13	II	13-14
	1. Sejauhmana keberhasilan proyek penangkaran benih padi di Kabupaten Lamongan. 2. Perlu penambahan petugas pengawasan teknis di lapangan. 3. Uji kualitas hendaknya lebih selektif 4. Perluasan penangkaran benih TA. 1997/1998 untuk mencukupi kekurangan di Kabupaten Lamongan	10-11	II	13-14
5.	Peran serta PPL Pertanian hendaknya ditingkatkan untuk meningkatkan teknologi para petani.	11	II	15
6.	1. Peningkatan benih jagung, kedelai, kacang-kacangan yang bersertifikat melalui proyek penangkaran benih 2. Pengendalian hama tanaman non padi melalui proyek SLPHT non padi. 3. Ketentuan harga dasar jagung, kedelai dan kacang-kacangan,	11	II	16
7.	<b><u>SUB SEKTOR PETERNAKAN</u></b>			
	1. Kondisi umum proyek TAMYAMSANG saat ini. 2. Jumlah petani yang mengikuti program TAMYAMSANG serta luas arealnya. 3. Berapah jumlah paket kredit yang telah direalisasikan oleh Proyek TAMYAMSANG dan berapa prosen pengembalian paket kredit. 4. Berapa petani tambak yang bergerak dalam usaha TAMYAMSANG modal sendiri. 5. Kegiatan proyek TAMYAMSANG dalam Koperasi. 1). Jumlah anggota koperasi Tamyamsang saat ini 2). Keanggotaan koperasi Tamyamsang yang berasal dari luar program Tamyamsang. 3). Modal Koperasi Tamyamsang dari pihak ketiga dan dari anggota 4). Adanya Pertokoan Kop. Tamyamsang apa kebutuhan anggota dan di luar anggota dapat dipenuhi.	12	II	17-19
8.	<b><u>SUB SEKTOR PERIKANAN</u></b>			
	1. Perencanaan program rehabilitasi gedung/los TPI Kranji tahun yang akan datang. 2. Pengupayaan pembangunan Box es di TPI Labuhan serta TPI Weru. 3. Pengaruh musibah ketian terhadap proses kegiatan pembenihan. 4. Proyek pembenihan di Paciran apa sudah dapat memberikan kontribusi PAD di Lamongan.	12 dan 13	II	19-20

No.	PERMASALAHAN	HALAMAN	JAWABAN	
	URAIAN		SEKTOR	HALAMAN
9.	<b>SUB SEKTOR KEUANGAN DAERAH</b> Tidak tercapai Penerimaan dari pajak dan retribusi maupun pos-pos lain dalam tahun 1996/1997 lebih ditingkatkan sehingga dalam PAK tahun 1997/1998 lebih meningkat.	13 Dan 14	V	26
10.	<b>SUB SEKTOR KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL</b> 1. Berapa KUD dari 24 KUD yang telah ditingkatkan kemampuan SDMnya 2. Hendaknya diupayakan penyelesaian KUD yang berstatus KUD mandiri. 3. Realisasi nyata dari KUD-KUD untuk memenuhi kebutuhan pengadaan pangan. 4. Disarankan KUD menampung pembelian langsung ke petani seperti kedelai jagung dan lainnya sehingga harga dapat stabil. 5. KUD perlu mengadakan program Pengadaan pangan, barang, dan 9 bahan pokok serta pengadaan saprodi dan peralatan pertanian.	15	V	30-31
11.	<b>SEKTOR TRANSPORTASI</b> <b>SUB SEKTOR PRASARANA JALAN</b> 1. Sejauhmana penyelesaian proyek jalan Ring road Deket-Jalan Sumargo. 2. Menunjang kelancaran transportasi lalu-lintas jalan menuju Makam Raden Rachmad Desa Sendangduwor Paciran perlu adanya pelebaran jalan pada tahun mendatang. 3. Semua kendaraan Angkutan Desa dapatnya masuk pada Pangkalan yang disediakan (Ngimbang, Pucuk, Sukodadi, Pasar Sidoarjo). 4. Reaslisasi pembebasan tanah dan bangunan proyek koridor jalur Gresik Lamongan Widang. 1). Sejauhmana pelaksanaan proyek tahap awal. 2). Berapa jumlah pemilik tanah pekarangan dan ketetapan harga masing-masing. 3). Berapa jumlah tempat Ibadah dan pendidikan yang terkena proyek. 4). Bagaimana cara mengatasi penyelesaiannya. 5). Berapa plafond dana tahap awal yang diploting untuk proyek ini. 6). Bagaimana kelanjutaannya pada tahap kedua.	16 Dan 17	VI	31-33
12.	<b>SEKTOR PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI DAERAH</b> <b>SUB SEKTOR PARIWISATA</b> 1. Perlunya penambahan jam kerja bagi Aparat Goa Maharani. 2. Pertimbangan pengangkatan tenaga honor menjadi PNS. 3. Perlunya penertiban pedagang kaki lima. 4. Perlunya pembangunan mainan anak-anak. 5. Perlunya adanya penyediaan air bersih pada tahun mendatang.	17	VIII	34-36
13.	<b>SEKTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA</b> <b>SUB SEKTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>  Himbauan bagi semua pihak untuk menjadi contoh teladan yang baik bagi pemuda dan waspada dalam mengatasi munculnya pihak-pihak tertentu yang ingin mengacaukan pembangunan di Negara Kita.	18	IX	36

No.	PERMASALAHAN	HALAMAN	JAWABAN	
	URAIAN		SEKTOR	HALAMAN
14.	<u>SUB SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL</u> <u>SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL</u>  Perlunya kerja sama aparatur Pemerintah dan Aparat Desa yang di Wilayah desanya terdapat praktek WTS liar.	18	X	37
15.	<u>SEKTOR APARATUR PEMERINTAH DAN PENGAWASAN</u> <u>SUB SEKTOR APARATUR PEMERINTAH</u>  1. Pelaksanaan proyek Pendidikan Aparatur Pemerintah Daerah dan proyek Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negera. 2. Perlunya peningkatan pelayanan masyarakat dari tahun ke tahun.	19	XI	38-39

No.	PERMASALAHAN		JAWABAN	
	URAIAN	HAL.	SEKTOR	HAL.
	<b><u>FRAKSI ANGKATAN BERSENJATA</u></b>			
	<b><u>REPUBLIK INDONESIA</u></b>			
1.	Menyarankan agar asset Pemda (roda 4 dan 2) yang kondisinya sudah tak layak pakai dapat dihapus atau diposal.	17	XII	42
2.	Mengharapkan operasional dari PD Bank Pasar dapat menjangkau keseluruhan pelosok pedesaan.	17	V	25
3.	Menghimbau agar Dinas-dinas Terkait memberikan bimbingan dan motivasi akan pentingnya kewajiban membayar Pajak dan Retribusi.	17	V	26
4.	Fraksi ABRI mendapat informasi bahwa di lokasi wisata Goa Maharani akan dibuatkan Kebun Bina-tang Mini.	18	VIII	35
5.	Menyarankan agar proyek galian pembongkaran jalan direncanakan secara matang sehingga tidak menimbulkan dampak kurang baik.	18	XII	42
6.	Menghimbau agar dalam masa-masa kampanye ini semua pihak dapat mengendalikan diri.	18	XII	43





**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N**

---

**JAWABAN EKSEKUTIF  
TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA  
RAPAT PARIPURNA I TAHUN SIDANG 1997/1998  
DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
TAHUN 1996/1997**

---

*Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh*

- Saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang saya hormati.
- Saudara Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Hadirin dan para Undangan yang saya hormati.

Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini perkenankanlah terlebih dahulu saya mengajak Saudara Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta segenap hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan KaruniaNya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna I DPRD Kabupaten Dati II Lamongan tahun sidang 1997/1998 dalam acara penyampaian jawaban Eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi Dewan yang terhormat dalam suasana kebersamaan dan kehangatan kekeluargaan.

Mengawali jawaban Eksekutif, terlebih dahulu disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Fraksi-fraksi Dewan yang terhormat atas semua tanggapan, saran, permohonan penjelasan maupun himbauan yang telah disampaikan pada tanggal 7 Mei 1997 dengan urutan pembacaan sebagai berikut :

1. Sdr. Kardo Surjopambudi, sebagai juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia.
2. Sdr. Drs. Nurul Zubad R., sebagai juru bicara Fraksi Karya Pembangunan.
3. Sdr. Ahmad Yahdi Sholeh, sebagai juru bicara Fraksi Persatuan Pembangunan.
4. Sdr. Tamsir bin Drachman, sebagai juru bicara Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Tidak lupa pula pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Panitia Anggaran yang telah mencurahkan perhatiannya terhadap pembahasan Rancangan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang pada akhirnya berpendapat bahwa Rancangan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1996/1997 dapat diterima dan dilanjutkan dalam persidangan berikutnya untuk diproses guna menjadi Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 1996/1997.

Selanjutnya sebelum memasuki materi pokok berupa Jawaban Eksekutif terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi Dewan yang terhormat, perkenankanlah terlebih dahulu saya menyampaikan terima kasih kepada Panitia Anggaran yang memberikan perhatian lebih atas terselenggaranya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab yang dititik beratkan pada Daerah Tingkat II.

Berhubung dengan itu perkenankan saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan otonomi daerah sebagai salah satu implementasi politik pemerintah di Daerah.

Berpedoman pada pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 telah ditetapkan adanya Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang menggariskan prinsip-prinsip pokok penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Pemberian otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dimaksudkan agar daerah dapat mengantisipasi laju pembangunan nasional dalam arti luas yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dan membina agar tercipta hubungan yang serasi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bukan hanya melaksanakan azas desentralisasi saja, tetapi harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi jalinan keterkaitan antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tak dapat dipisahkan demi terciptanya dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan urusan di daerah.

Sedang hakekat pemberian otonomi kepada Daerah ialah untuk memungkinkan Daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Jadi pemberian otonomi kepada Daerah ini lebih merupakan kewajiban daripada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan pasal 11 Undang-undang nomor 5 tahun 1974 bahwa titik berat Otonomi diletakkan pada daerah tingkat II, dengan demikian berarti akan semakin banyak urusan pemerintahan yang akan diserahkan kepada Pemerintah daerah tingkat II. Ini berarti daerah tingkat II harus menyediakan segala kebutuhan pendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah baik manusia, keuangan dan perlengkapannya.

Selanjutnya marilah sejenak melihat pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lamongan.

Setelah urusan pangkal yang meliputi sebagian urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan urusan pemerintahan umum, secara berangsur-angsur kita telah menerima urusan tambahan yaitu :

- a. Urusan Pertanian Tanaman Pangan diserahkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 tahun 1989.
- b. Urusan Perkebunan diserahkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 tahun 1989.
- c. Urusan Peternakan diserahkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1989.
- d. Urusan Perikanan diserahkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1989.
- e. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan diserahkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1990.
- f. Urusan Lalu lintas dan Angkutan Jalan diserahkan oleh Pemerintah Pusat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1990.
- g. Urusan Pariwisata diserahkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1992.
- h. Urusan Pengairan diserahkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 17 tahun 1994.

Dari kedelapan tambahan urusan pemerintah tersebut, secara keseluruhan telah disetujui oleh DPRD Tingkat II Lamongan dan telah dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Tingkat II Lamongan yang meliputi :

- a. Urusan Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Tingkat II Lamongan Nomor 16 tahun 1989 tanggal 8 Desember 1989.
- b. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Tingkat II Lamongan Nomor 2 tahun 1991 tanggal 3 Januari 1991.
- c. Urusan Lalu lintas dan Angkutan Jalan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Tingkat II Lamongan Nomor 5 tahun 1991 tanggal 16 Januari 1991.

d. Urusan Pariwisata dengan Keputusan Pimpinan DPRD Tingkat II Lamongan Nomor 8 tahun 1992 tanggal 26 April 1992.

e. Urusan Pengairan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Tingkat II Lamongan Nomor 13 tahun 1994 tanggal 17 Nopember 1994.

Sebagai tindak lanjut dari penyerahan urusan tersebut maka telah kita bentuk Dinas-Dinas Daerah yang tertuang dalam beberapa Peraturan Daerah.

Sementara itu untuk urusan lalu lintas dan angkutan jalan telah diberikan petunjuk pelaksanaan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan suratnya tanggal 24 Pebruari 1992 nomor 061/3848/041/1992 perihal pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas LLAJ Daerah Tingkat II yang sementara waktu dibentuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah. Sebagai realisasi dari petunjuk Gubernur Kepala Daerah tersebut telah dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Dinas LLAJ Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Lamongan Nomor 3 tahun 1994.

Dalam upaya lebih memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah dan lebih meningkatkan pelayanan masyarakat, maka telah dibentuk dinas dan unit kerja baru sebagai pengembangan urusan pangkal, yaitu :

- 1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan nomor 3 tahun 1991.
- 2) Dinas Pengelolaan Pasar Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan nomor 4 tahun 1991.
- 3) Dinas Perhutanan dan Konservasi tanah daerah, berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan nomor 76 tahun 1994.
- 4) Kantor Arsip Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan nomor 9 tahun 1997.
- 5) Kantor Perpustakaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan nomor 7 tahun 1995.
- 6) Unit Samsat Perijinan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan nomor 424 tahun 1993.

Tidak kalah penting dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat ini juga telah dilakukan pemantapan terhadap Badan Usaha Milik Daerah yaitu :

- 1) Perusahaan Daerah Air Minum dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan nomor 5 tahun 1992.
- 2) Perusahaan Daerah Bank Pasar dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan nomor 20 tahun 1995.

Dan pada saat ini telah kita kembangkan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Lamongan nomor 12 tahun 1997.

Penataan kelambagaan tersebut juga telah diikuti dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan baik diklat struktural maupun diklat fungsional, disamping mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam rangka *rekruting* pegawai dengan basic pendidikan yang relatif tinggi. Upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ini akan terus dilanjutkan.

Upaya memantapkan pelaksanaan otonomi daerah tersebut juga diikuti dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung baik yang terkait langsung dengan upaya pelayanan masyarakat maupun sarana pendukung kegiatan administrasi pemerintahan. Secara bertahap upaya ini akan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.

Dapat difahami bahwa keseluruhan upaya peningkatan pelaksanaan otonomi daerah tersebut tidak lepas dari dukungan dana.

Upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah tidak saja meliputi pembinaan terhadap sumber pendapatan daerah, tetapi juga peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien serta tetap diiringi dengan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

*Sidang Dewan Yang Terhormat,*

Selanjutnya dalam kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Yang Terhormat secara terurai dalam berbagai sektor sebagai berikut :

## I. SEKTOR INDUSTRI.

### SUB SEKTOR INDUSTRI

1. a. Disampaikan terima kasih atas perhatian Yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan terhadap pengembangan sektor industri kecil di Kabupaten Lamongan.

Sebagaimana yang telah menjadi program Eksekutif, bahwa industri kecil tersebut tetap terus akan dibina dan dikembangkan menjadi usaha yang mandiri sehingga akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta sebagai penyediaan lapangan kerja.

Adapun terhadap beberapa produk industri rumah tangga yang telah diberi kemasan untuk mempercantik penampilan guna memasuki pasar yang luas adalah produk-produk industri sebagai berikut :

- 1). Wingko.
- 2). Jenang.
- 3). Kripik Bayam
- 4). Tenun Ikat.
- 5). Abon Bandeng.
- 6). Songkok.
- 7). Kosmetik.
- 8). Ikan kering.

- b. Selanjutnya terhadap permohonan informasi mengenai pengembangan TAMYAMSANG menuju terciptanya agro industri sehubungan dengan saran Bapak Menristek Prof. B.J. Habibie dapat disampaikan sebagai berikut :

Berdasarkan petunjuk dan saran Menristek pada saat peresmian Kantor Pusat Informasi TAMYAMSANG pada tanggal 1 April 1997, yaitu perlunya dibuat rencana pengembangan dengan terlebih dahulu membuat suatu model pengembangan dengan *representatif action* areal seluas 100 Ha yang nantinya dapat dibuat berbagai kajian agar hasilnya dapat optimal dan dapat diaplikasi-

kan di seluruh Wilayah Kabupaten Lamongan dan bahkan Tingkat Nasional.

Dalam perencanaan yang dituangkan dalam proposal model pengembangan proyek TAMYAMSANG ini, untuk komoditi ikan akan dikembangkan diversifikasi usaha dengan sistem polikultur bandeng dan udang galah yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi disamping produk olahan paska panen maupun pengawetan dan pengepakan.

Hal-hal yang berkaitan dengan penyediaan benih nener ataupun benur akan dicukupi dengan membangun Hatchery (Panti Pijah) udang galah di Kecamatan Karanggeneng dan optimalisasi Hatchery nener yang sudah ada di Paciran.

- **Pengembangan komoditi ayam**, akan dilakukan perbaikan pembibitan dengan menyediakan *parent stock* (bibit induk) dan inseminasi buatan guna menghasilkan telur yang sesuai dengan induknya.

Selanjutnya agar produksi telur mempunyai nilai ekonomis yang tinggi maka akan diolah menjadi telur rendah kolesterol melalui teknologi Omega 3, yang nantinya akan dapat menembus konsumen di kelas menengah dan tinggi melalui hotel-hotel dan supermarket.

- **Pengembangan Komoditi Pisang**, lebih dititikberatkan pada perlakuan paska panen yaitu dengan membangun rumah pemeraman (*ripening house*) yang dapat mengatur kelembaban temperatur guna menjadikan pisang lebih enak dan menarik untuk dipasarkan dan dapat menjamin kontinuitas pemenuhan permintaan konsumen.

Sedangkan untuk produk olahannya, masih dalam kajian baik teknologi maupun pasarnya.

- **Pengembangan Kelembagaan**, yang menyangkut keanggotaan tetap akan dikembangkan sesuai dengan tahapan dari hasil study yang telah dilakukan yaitu sampai dengan pemilikan lahan seluas 250 hingga 300 Ha dengan pembiayaan yang bersumber

dari BUMN atau lembaga perbankan lainnya dengan sistem swadana (KKPA).

Perusahaan Inti yang sekarang dipegang Koperasi TAMYAM-SANG pada tahap lanjut/berkembang (300 Ha - 1.000 Ha) akan diserahkan kepada perusahaan konsorsium (PT) yang akan didirikan bersama-sama antara PD Aneka Usaha Lamongan Jaya, Koperasi TAMYAMSANG dan Swasta Nasional

- *Pengembangan SDM*, akan diarahkan untuk peningkatan ketrampilan budidaya intensif dengan pendekatan teknologi aplikatif dan usaha, baik pada pemeliharaan ternak ikan dan pisang maupun ketrampilan produk olahan berskala rumah tangga.

Pada saat sekarang sedang dilatih ketrampilan membuat abon bandeng, kripik pisang dan selai pisang bagi ibu-ibu atau anggota keluarga petani Tamyamsang, dan sedang dalam kajian untuk mendesain tehnologinya yang lebih aplikatif bagi masyarakat pedesaan.

2. Atas permohonan penjelasan dari Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan, dalam kaitan kebijaksanaan pembangunan Sektor Industri telah diarahkan terhadap usaha industri kecil dan kerajinan rakyat dengan sasaran peningkatan kualitas hasil produksi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk itu perlu disampaikan informasi kepada Fraksi Persatuan Pembangunan terhadap pelaksanaan pembangunan sektor industri sebagai berikut :

a) Sebagaimana harapan, proyek pembangunan usaha industri kecil/kerajinan rakyat, yakni meningkatkan mutu, jumlah produksi dan pengembangan modal usaha sehingga mampu bersaing dalam pangsa pasar.

b) Sedangkan bentuk dan proyek penyusunan profil industri kecil pada tahun anggaran 1996/1997 yaitu berupa buku yang berisi tentang penyusunan perencanaan mengenai :

1) Pembangunan Wilayah Sentra Industri Kecil Kerajinan bordir Desa Bogobabandan Kecamatan Karangbinangun.

2) Pembangunan Wilayah Sentra Industri Kecil Anyaman Pandan Desa Tlemang Kecamatan Ngimbang.

Adapun maksud dan tujuan disusunnya rencana pembangunan wilayah Sentra Industri Kecil Kerajinan Bordir Desa Bogobabadan Kecamatan Karangbinangun dan Anyaman Pandan Desa Tlemang Kecamatan Ngimbang adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk memberikan arah dan pedoman dasar pembinaan dan pengembangan Industri kecil kerajinan bordir dan anyaman pandan pada masing-masing desa tersebut menuju bentuk desa kerajinan yang diharapkan. Dengan demikian Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dimanfaatkan secara optimal dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan terpeliharanya kelestarian lingkungan.
- 2) Untuk memberikan gambaran tentang hasil yang ingin dicapai dalam mewujudkan Desa Kerajinan baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat diwujudkan lingkungan Desa Bogobabadan dan Desa Tlemang sebagai " *Desa Kerajinan* ".

c) Adapun jumlah Industri Kecil yang telah mendapatkan pembinaan pengembangan usaha dan peralatan dari proyek Tahun Anggaran 1996/1997 sebesar Rp. 20.000.000,00 meliputi :

- Industri Kecil Anyaman Pandan Desa Tlemang Kecamatan Ngimbang.
- Industri Kecil Gerabah Desa Talunrejo Kecamatan Bluluk.
- Industri Kecil Konfeksi dan Bos Kopyah Desa Mluwur Kecamatan Glagah.
- Industri Kecil pengolahan hasil jambu Mente Desa Tlogosadang Kecamatan Paciran.

3. Terhadap prospek pasar hasil produksi Songkok berlabel "*Songkok Cap Cahaya Bintang*" yang diproduksi pengrajin saudara Misbachul Munir dari Desa Bojosari Kecamatan Kalitengah dapat diinformasikan bahwa songkok tersebut pemasarannya telah mencapai

kota-kota besar di Jawa Timur seperti Banyuwangi, Jember dan lain-lain.

Sedangkan terhadap bantuan yang telah disalurkan oleh Pemerintah meliputi :

- a) Upaya pembinaan meliputi keterkaitan bapak angkat yakni perusahaan kosmetik "Vicaris" Babat, dengan materi bantuan antara lain :
  - Peralatan mesin jahit sebanyak 6 unit.
  - Pemasaran hasil produksi keluar Jawa yakni Kalimantan.
- b) Mengikutsertakan hasil produksi songkok dalam acara-acara pameran baik regional maupun Nasional.

4. Selanjutnya atas harapan berkaitan dengan perwujudan tempat promosi atau Show Room yang diharapkan bisa menampung hasil produksi pengrajin disampaikan terima kasih.

Namun demikian solusi untuk pendirian tempat promosi tetap diperlukan pemikiran dan pengkajian mendalam oleh Eksekutif, sejalan dengan program tersebut Pihak Eksekutif berupaya membina agar secara swadana para pengrajin mendirikan show room secara mandiri.

Dari aspek pengorganisasian terhadap sentra-sentra industri kerajinan yang telah berkembang dalam kegiatan berkoperasi, terhadap kebutuhan sarana produksi dan pemasaran dapat berjalan lebih baik serta masih terus diupayakan Pihak Eksekutif secara optimal.

## **II. SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN**

### **SUB SEKTOR PERTANIAN RAKYAT**

1. Terhadap permohonan penjelasan Yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan tentang pelaksanaan praktek tanaman hidroponik dengan teknologi sederhana, dan beberapa hal yang berkaitan dengan sektor pertanian dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Pada Tahun Anggaran 1996/1997 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Lamongan telah melaksanakan percontohan penanaman tanaman sayuran dengan sistem hidroponik.

Kegiatan ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Raudlotul Muta'allima, Datinawong Babat. Proyek ini adalah merupakan salah satu proyek dari 17 proyek di Pondok Pesantren di Jawa Timur yang didanai dari PAK, APBD I Tahun Anggaran 1996/1997.

Latar belakang mengapa proyek tersebut dialokasikan di Pondok Pesantren adalah dalam rangka untuk meningkatkan peranan Pondok Pesantren dalam pembangunan.

Kalau sebelumnya titik berat fungsi Pondok Pesantren adalah sebagai pusat pengkaderan pemimpin umat yang akan menangani pembinaan masyarakat dalam bidang keagamaan, maka agar peranannya dalam ikut serta mensukseskan pembangunan nasional lebih besar lagi, kepada Pondok Pesantren perlu dilengkapi dengan komponen-komponen pendidikan ketrampilan, kewirausahaan, kepramukaan dan lain-lain sehingga nantinya para santri dapat mengembangkan sikap wiraswasta, sikap mandiri dan sikap pengabdian yang tinggi dalam masyarakat.

Sedang alasan mengapa yang diprogramkan hidroponik sayuran, hal ini melihat bahwa para santri hampir seluruhnya dari keluarga tani disamping itu juga untuk mengantisipasi permintaan pasar terhadap sayuran yang berkualitas.

Jenis tanaman yang dibudidayakan sementara ini adalah timun jepang, tomat, lombok, terung dan sawi.

Untuk perluasan budidaya hidroponik ini, dalam waktu dekat akan diselenggarakan temu wicara dengan para wali santri dengan tujuan untuk memperkenalkan cara budidaya hidroponik, dengan harapan agar dapat dikembangkan dan dilaksanakan di pekarangan mereka masing-masing.

b. Adapun mengenai tanaman pisang jenis Cavendish pada Proyek Tamyamsang di Kecamatan Karanggeneng menunjukkan pertumbuhan dan produksi yang cukup baik. Keadaan yang demikian memberikan indikasi bahwa ada kemungkinan jenis pisang-pisang lain tumbuh baik. Pemikiran ini memang sudah ada, oleh karena itu pada pengembangan tanaman pisang yang akan datang direncanakan dicoba beberapa jenis pisang unggul lokal yang mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti Pisang Raja, Kepok Kuning dan Ambon Kuning. Bibit kultur jaringan dipesan dari kebun penelitian BPPT Serpong dan PT Horti Nusantara. Sementara ini kita belum perlu membuat laboratorium pembibitan kultur jaringan karena biaya investasinya cukup besar.

c. Selanjutnya tentang pengadaan benih padi tahun ini yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan hanya 25 Ha. yang diselenggarakan di Kebun Dinas Pertanian Tingkat I yang ada di Lamongan. Sementara ini Dinas Pertanian memang belum berani melaksanakan pembibitan secara luas seperti pada tahun anggaran 1995/1996 yang lalu, yaitu sampai 100 Ha.

Pengalaman tahun 1995/1996, karena sarana dan prasarana seperti angkutan, lantai jemur, alat prosesing dan gudang, semuanya harus menyewa mengakibatkan biaya produksi sangat tinggi sehingga kalau harga jualnya sama, akan rugi. Untuk pengadaan seluas 25 Ha. yang dilaksanakan di Kebun Dinas Pertanian Tingkat I, semua peralatan yang dibutuhkan, kita dapat meminjam dari peralatan yang sudah ada. Kalaupun terjadi keterlambatan dana, kita masih dapat menggunakan tenaga Dinas yang ada di Kebun tersebut.

Tentang usulan usaha pembibitan komoditas pertanian untuk menjadi salah satu unit usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya sangat setuju, dan sekarang masih dalam tahap pengkajian dalam rangka untuk menentukan usaha pembibitan

apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara pengadaannya sehingga nantinya dapat memberikan pendapatan bagi Daerah.

2. Adapun permintaan penjelasan Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan tentang program pembangunan usaha tani tahun anggaran 1996/1997 dan lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Proyek Penangkaran Benih Padi pada tahun anggaran 1996/1997 seluas 20 Ha. dengan alokasi dana sebesar 25 Juta Rupiah.

Pembenihan ini telah dilaksanakan di Kebun Benih Dinas Tingkat I yang ada di Kabupaten Lamongan, yaitu di Kebun Benih Blawirejo Kecamatan Kedungpring seluas 14 Ha. dan di Kebun Benih Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng seluas 6 Ha. Pembinaan dan pengawasannya dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Lamongan dan dilakukan secara intensif, dan diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan pada tahun 1997/1998.

b. Sedangkan untuk proyek peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dengan alokasi dana sebesar 45 Juta Rupiah, dapat diinformasikan sebagai berikut :

1) Dana sebesar 25 Juta Rupiah untuk Penangkaran Benih Padi di Kebun Benih Blawirejo dan Kebun Benih Kawistolegi seluas 20 Ha.

2) Sedangkan yang 20 Juta Rupiah untuk kegiatan Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) sesuai dengan hasil survey dan permintaan petani, yaitu untuk :

a) Kecamatan Ngimbang dengan kegiatan demplot penanaman Pisang Cavendish dan bantuan hand tractor.

b) Kecamatan Bluluk dengan kegiatan demplot penanaman Pisang Cavendish dan bantuan hand tractor.

c) Kecamatan Glagah dengan kegiatan bantuan pompa air.

Semua kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan petani dan sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja hewan serta kekurangan air.

c. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa :

1) Keberhasilan Proyek Penangkaran Benih Padi di Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 1996/1997 seluas 20 Ha. telah memperoleh benih sebanyak 36 Ton 428 Kg.

Jumlah benih tersebut minimal sudah dapat membantu menambah penyediaan benih bagi para petani untuk musim tanam berikutnya.

2) Dalam penangkaran benih untuk mendapatkan benih yang berkualitas, telah ditugaskan kepada petugas khusus yang menangani pengawasan benih sejak awal sampai menjadi benih yaitu Petugas Balai Pengawasan Sertifikat Benih (BPSB) dari Tingkat I Jawa Timur yang jumlahnya hanya 1 orang. Namun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan dibantu oleh petugas teknis yang ada yaitu Mantri Pertanian Kecamatan dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

3) Mengenai penambahan luas penangkaran benih padi untuk tahun yang akan datang tetap akan diupayakan selain dari dana APBD II juga melalui perluasan penangkaran benih yang dilaksanakan oleh penangkar benih swasta yang dibina oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

3. Pembinaan PPL terhadap kelompok tani sampai saat ini sudah dilaksanakan setiap hari, dari mulai hari Senin sampai Sabtu, jadi tidak hanya menjelang musim tanam saja. Materi penyuluhan yang diberikan oleh para PPL disesuaikan dengan kegiatan petani di lapangan pada saat itu, mulai dari kegiatan kesiapan lahan, pra panen sampai pasca panen.

4. a. Tentang saran proyek penangkaran benih palawija (jagung, kedelai dan kacang-kacangan) sebetulnya sudah dilaksanakan melalui anggaran dari APBD I, hanya luasnya masih kecil. Hal ini disebabkan karena penyediaan benih SS (benih pokok) masih sangat terbatas. Disamping itu benih palawija juga tidak bisa disimpan lama seperti halnya benih padi. Oleh karena itu, sementara teknologi penyimpanan benih palawija secara praktis belum diketemukan, penyediaannya dianjurkan melalui Sistem Jabal (Jalinan Arus Benih Antar Lapang) yang dilaksanakan antar Kelompok Tani.
- b. Untuk pembinaan terhadap pengendalian hama non padi telah dirintis melalui proyek SLPHT. Untuk tahun anggaran 1996/1997 Proyek SLPHT Non Padi telah dilaksanakan di Kecamatan Sugio, Tikung dan Brondong, sedangkan untuk tahun anggaran 1997/1998 ini dilaksanakan di Kecamatan Tikung untuk kedelai dan Kecamatan Solokuro untuk tanaman lombok.
- c. Terhadap harga komoditas palawija sampai saat ini memang tidak ada ketentuan harga dasar seperti halnya padi. Untuk mengatasi permasalahan harga pada saat panen raya, sekarang sedang dikembangkan program kemitraan antara kelompok tani dengan para pengusaha makanan ternak.
- Para pengusaha diharapkan mengadakan kontrak pembelian hasil palawija yang dibutuhkan dari petani selama harga pasar tidak lebih tinggi dari harga import.

#### **SUB SEKTOR PETERNAKAN**

Terhadap permohonan penjelasan Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan tentang pelaksanaan program kegiatan Tamyamsang di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dalam tahun anggaran 1996/1997 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kondisi umum program Tamyamsang, bahwa Proyek telah diselesaikan 100% dengan kondisi pelaksanaan baik dan diserahkan kepada pengelola yaitu Koperasi Tambak Ayam Pisang yang dalam hal ini bertindak selaku inti dalam pola inti plasma (aplikasi pola PIR) sejak awal bulan Pebruari 1997.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa dari komoditi ikan telah mengalami kenaikan kualitas panen terutama dari Tawes dan Tombro sedang untuk Bandeng tidak mengalami perubahan, saat sekarang sedang diuji coba budidaya ikan dengan sistem Polikultur bandeng dan udang galah.

Untuk komoditi ternak ayam buras, grafik telur menunjukkan kenaikan walaupun masih belum optimal, dengan kondisi kesehatan ayam terkendali dengan mortalitas yang sangat rendah.

Untuk pisang menunjukkan hasil yang sangat menyenangkan karena petani sudah merasakan hasil panen dengan kualitas panen yang sangat baik, jumlah sisir mencapai 8 s/d 10 sisir per tandan bahkan banyak yang mencapai 12 sisir dengan berat rata-rata 20 s/d 25 Kg/tandan.

2. Jumlah petani yang mengikuti proyek Tambak Ayam Pisang sebanyak 101 orang dengan keseluruhan areal seluas 78,6 Ha, dengan perincian sebagai berikut :

Paket lengkap	: 20 orang (Ikan, Ayam dan Pisang)
Paket Ayam dan Pisang	: 9 orang
Paket Ikan dan Pisang	: 7 orang
Paket Ikan	: 1 orang
Paket Pisang	: 58 orang
Paket Ayam	: 5 orang
Paket Ikan dan Ayam	: 1 orang

3. Jumlah keseluruhan kredit yang direalisasikan 224 Juta 564 Ribu 942 Rupiah dengan perincian sebagai berikut :

- a. Paket ikan dengan total kredit sebesar 8 juta rupiah.
- b. Paket ayam dengan total kredit sebesar 164 Juta 412 Ribu 900 Rupiah.
- c. Paket pisang dengan total kredit sebesar 52 Juta 152 Ribu 42 Rupiah.

Adapun pengembalian kredit dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Paket Ikan sebesar 1 juta 163 ribu 750 rupiah waktu pengembalian pada bulan Desember 1996 dan bulan Mei 1997.
  - b. Paket Ayam sebesar 535 ribu 500 rupiah dengan masa angsuran selama 3 Tahun.
  - c. Paket Pisang sebesar 1 juta 5 ribu 900 rupiah waktu pembayaran pada bulan Mei 1997.
4. Petani tambak yang mengikuti program Tamyamsang dengan sistim Swadana sebanyak 4 Orang (modal kerja berasal dari Koperasi Tamyamsang), masing-masing sebagai berikut :

Untuk Paket Ikan sebanyak 2 orang.

Untuk Paket Pisang sebanyak 2 orang.

5. Keanggotaan Koperasi Tamyamsang sebanyak 106 orang (bertambah 5 orang sejak operasional bulan Januari 1997).

Keanggotaan yang berasal dari luar program Tamyamsang tidak ada.

Modal Koperasi :

- a. Modal Donasi dari Pemerintah Daerah Tingkat II Lamongan yang masih bergulir di petani (Modal bergulir) sebesar 224 Juta 564 Ribu 942 Rupiah.
- b. Bantuan dari Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur sebesar 10 Juta Rupiah dan bantuan yang masih dalam proses pencairan sebesar 7 Juta 500 Ribu Rupiah.
- c. Bantuan dari BUMN (Perum Perhutani Jawa Timur) melalui KPH Perum Perhutani Tuban sebesar 18 Juta Rupiah sedang modal yang berasal dari anggota yang berupa Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sebesar 5 Juta 50 Rupiah.

- a. Paket ikan dengan total kredit sebesar 8 juta rupiah.
- b. Paket ayam dengan total kredit sebesar 164 Juta 412 Ribu 900 Rupiah.
- c. Paket pisang dengan total kredit sebesar 52 Juta 152 Ribu 42 Rupiah.

Adapun pengembalian kredit dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Paket Ikan sebesar 1 juta 163 ribu 750 rupiah waktu pengembalian pada bulan Desember 1996 dan bulan Mei 1997.
  - b. Paket Ayam sebesar 535 ribu 500 rupiah dengan masa angsuran selama 3 Tahun.
  - c. Paket Pisang sebesar 1 juta 5 ribu 900 rupiah waktu pembayaran pada bulan Mei 1997.
4. Petani tambak yang mengikuti program Tamyamsang dengan sistim Swadana sebanyak 4 Orang (modal kerja berasal dari Koperasi Tamyamsang), masing-masing sebagai berikut :

Untuk Paket Ikan sebanyak 2 orang.

Untuk Paket Pisang sebanyak 2 orang.

5. Keanggotaan Koperasi Tamyamsang sebanyak 106 orang (bertambah 5 orang sejak operasional bulan Januari 1997).

Keanggotaan yang berasal dari luar program Tamyamsang tidak ada.

Modal Koperasi :

- a. Modal Donasi dari Pemerintah Daerah Tingkat II Lamongan yang masih bergulir di petani (Modal bergulir) sebesar 224 Juta 564 Ribu 942 Rupiah.
- b. Bantuan dari Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur sebesar 10 Juta Rupiah dan bantuan yang masih dalam proses pencairan sebesar 7 Juta 500 Ribu Rupiah.
- c. Bantuan dari BUMN (Perum Perhutani Jawa Timur) melalui KPH Perum Perhutani Tuban sebesar 18 Juta Rupiah sedang modal yang berasal dari anggota yang berupa Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sebesar 5 Juta 50 Rupiah.

- a. Paket ikan dengan total kredit sebesar 8 juta rupiah.
- b. Paket ayam dengan total kredit sebesar 164 Juta 412 Ribu 900 Rupiah.
- c. Paket pisang dengan total kredit sebesar 52 Juta 152 Ribu 42 Rupiah.

Adapun pengembalian kredit dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Paket Ikan sebesar 1 juta 163 ribu 750 rupiah waktu pengembalian pada bulan Desember 1996 dan bulan Mei 1997.
  - b. Paket Ayam sebesar 535 ribu 500 rupiah dengan masa angsuran selama 3 Tahun.
  - c. Paket Pisang sebesar 1 juta 5 ribu 900 rupiah waktu pembayaran pada bulan Mei 1997.
4. Petani tambak yang mengikuti program Tamyamsang dengan sistim Swadana sebanyak 4 Orang (modal kerja berasal dari Koperasi Tamyamsang), masing-masing sebagai berikut :

Untuk Paket Ikan sebanyak 2 orang.

Untuk Paket Pisang sebanyak 2 orang.

5. Keanggotaan Koperasi Tamyamsang sebanyak 106 orang (bertambah 5 orang sejak operasional bulan Januari 1997).

Keanggotaan yang berasal dari luar program Tamyamsang tidak ada.

Modal Koperasi :

- a. Modal Donasi dari Pemerintah Daerah Tingkat II Lamongan yang masih bergulir di petani (Modal bergulir) sebesar 224 Juta 564 Ribu 942 Rupiah.
- b. Bantuan dari Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur sebesar 10 Juta Rupiah dan bantuan yang masih dalam proses pencairan sebesar 7 Juta 500 Ribu Rupiah.
- c. Bantuan dari BUMN (Perum Perhutani Jawa Timur) melalui KPH Perum Perhutani Tuban sebesar 18 Juta Rupiah sedang modal yang berasal dari anggota yang berupa Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sebesar 5 Juta 50 Rupiah.

- d. Dengan berdirinya Unit Pertokoan Koperasi Tamyamsang seluruh kebutuhan petani yang berupa pupuk, pakan ternak, obat-obatan ternak, pakan ikan dan saprodi lainnya dapat dilayani oleh unit usaha ini begitu pula untuk petani diluar proyek Tamyamsang (sebagian berasal dari Kecamatan Kalitengah disamping Kecamatan Karanggeneng sendiri).

## **SUB SEKTOR PERIKANAN**

1. Atas saran Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan terhadap rehabilitasi gedung/los TPI Kranji, hal tersebut telah menjadi pemikiran Eksekutif.
2. Terhadap pembangunan Boks Es TPI Labuhan, Pihak Eksekutif telah berupaya untuk merencanakan pembangunannya, sedangkan untuk Boks Es di TPI Weru yang telah dibangun melalui anggaran Inpres Dati II tahun anggaran 1994/1995 kondisinya masih cukup baik.
3. Tentang adanya kematian induk bandeng di Panti Pembenihan Bandeng Tanjung Kodok, Kecamatan Paciran, secara umum tidak mempengaruhi proses kegiatan pembenihan, namun apabila dilihat dari produktifitas hasil akan menurun, dikarenakan kurang tersedianya induk bandeng.  
Perlu kami informasikan, bahwa induk bandeng yang mati telah diproses untuk mengganti dengan induk bandeng yang baru melalui ploting anggaran APBD Tingkat I tahun anggaran 1997/1998.
4. Sampai saat ini, Pembenihan Bandeng Tanjung Kodok Paciran belum dapat memberikan kontribusi pada PAD Tingkat II Lamongan, namun dalam proses kegiatannya telah dapat menambah saham investasi pada Panti Pembenihan Bandeng, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a. Dalam proses kegiatan pembenihan bandeng, untuk tahun pertama operasional (Mei 1995 s/d Mei 1996), biaya operasional dibebankan kepada investor (Pihak Kedua) yang dimasukan

sebagai saham investasi investor, sehingga pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana sebesar 36 Juta 708 Ribu 375 Rupiah yang merupakan dana pendapatan dari penjualan telur dan nener yang dianggap sebagai hasil bersih.

Nilai dana tersebut digunakan untuk penyertaan modal investasi, baik oleh Pihak Pertama (Pemda Tingkat II Lamongan) maupun Pihak Kedua (Investor) dengan rasio nilai :

Pihak I : 45% sebesar Rp. 16.518.769,00

Pihak II : 55% sebesar Rp. 20.189.606,00

Dengan demikian akan terjadi perubahan penyertaan nilai saham menjadi :

Pihak I sebesar Rp. 480.518.769,00

Pihak II sebesar Rp. 620.189.606,00

- b. Hasil pendapatan tahun 1996/1997 digunakan untuk mencukupi kebutuhan biaya operasional yang setiap bulannya masih cukup besar, sehingga antara biaya operasional dengan pendapatan masih belum memperoleh keuntungan.

### **III. SEKTOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI.**

#### **SUB SEKTOR IRIGASI**

1. Permohonan penjelasan yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan tentang program pemeliharaan dan pengembangan saluran irigasi dapat dijelaskan bahwa Pembangunan Pengairan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan telah dilaksanakan baik itu berupa pengendalian banjir maupun tentang penyediaan air irigasinya yang berupa pengerukan waduk/rawa dan sungai-sungai, juga perbaikan jaringan irigasi yang telah dilaksanakan rata-rata menyerap dana pembangunan  $\pm$  2 Milyar Rupiah/tahun (belum termasuk yang dikelola Proyek Bengawan Solo) bahkan perlu kami informasikan untuk program tahun 1997/1998 telah dialokasikan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dana sebesar  $\pm$  5,2 Milyar Rupiah sehingga terdapat kenaikan 169 %.

Lebih lanjut tentang pembangunan/perbaikan Pengairan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan disamping melaksanakan pemeliharaan secara rutin dan perbaikan secara fungsi dengan melalui dana APBD I/APBN maupun dari partisipasi masyarakat melalui dana IPAIR.

Untuk program pembangunan jaringan irigasi yang lebih luas (skala besar) telah diprogramkan melalui proyek IRJAT lewat Java Irrigation Improvement and Water Management Project (JIWMP)/LOAN yang Survey dan Design-nya telah dimulai sejak tahun 1995/1996 dan pelaksanaan fisiknya akan dimulai pada tahun anggaran 1997/1998 ini dan direncanakan untuk perbaikan secara keseluruhan pada jaringan irigasi yang ada dapat diselesaikan sampai tahun 2000/2001.

2. Terhadap permohonan penjelasan dari Fraksi Karya Pembangunan, mengenai realisasi pembangunan sudetan Bengawan Solo Plangwot - Sedayulawas (Flood Way) dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - Bahwa sampai dengan Tahun Anggaran 1996/1997 telah dilaksanakan penggalian yang sudah mencapai 1,02 juta m<sup>3</sup> atau 12 % dari target yang direncanakan volume galian mencapai 8,5 juta m<sup>3</sup>, dengan lebar dasar mencapai 25 m sepanjang 8 Km.
  - Sedangkan kelanjutan dari pelaksanaan pekerjaan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan, namun pihak Eksekutif juga telah mendesak untuk segera dipercepat pelaksanaannya, mengingat di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan saat ini telah banyak investor baik untuk industri maupun pariwisata yang mengajukan permohonan ijin untuk mendirikan industri dan pembangunan kawasan pariwisata yang sangat membutuhkan air baku untuk mendukung kegiatan tersebut.

Pihak Bengawan Solo Hilir sebagai pelaksana sudetan tersebut menyatakan kesanggupan untuk mempercepat penyelesaiannya, yang seharusnya selesai tahun 2001 dapat dipercepat penyelesaiannya pada awal tahun 1999.

Untuk pembangunan Dam Gerak (RUBBER DAM) akan dilaksanakan pada tahun 1997/1998, tetapi tetap belum bisa difungsikan karena menunggu sampai selesainya normalisasi/penggalian tanah pada awal tahun 1999.

- Adapun mengenai pembangunan Rawa Jabung akan dilaksanakan sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan yaitu dilaksanakan pada phase II yang dimulai tahun 1998/1999 sampai dengan tahun 2003/2004 dengan luas genangan 5.500 Ha dan kapasitas tampungnya 141,7 juta m<sup>3</sup>.

#### **IV. SEKTOR TENAGA KERJA.**

##### **SUB SEKTOR TENAGA KERJA**

Permohonan penjelasan Yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan terhadap Sub Sektor ini dapat dijelaskan bahwa berkaitan dengan sektor industri terutama industri kecil atau kerajinan rumah tangga, mengenai pemberian upah kepada tenaga kerja dapat dipantau dengan baik dan selalu dilakukan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan agar melaksanakan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di Kabupaten Lamongan. Dan pada sektor tersebut hingga saat ini mampu menyerap tenaga kerja kurang lebih 78.541 orang.

Adapun upaya untuk mengantisipasi perkembangan ketenagakerjaan seiring dengan pesatnya perkembangan industri kecil telah dilakukan upaya-upaya antara lain :

- Mengatur penyiapan dan penyebaran tenaga kerja.
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan langkah membuat program pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan daerah melalui metode Institusional atau Non Institusional.
- Meningkatkan perlindungan tenaga kerja tentang syarat-syarat kerja dan norma-norma kerja.

## V. SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA DAERAH, KEUANGAN DAERAH DAN KOPERASI.

### SUB SEKTOR PERDAGANGAN.

1. Saran Yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan agar diadakan penataan disekitar Pasar Ikan yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota disampaikan terima kasih dan akan diprogramkan sebagai bagian dari kegiatan pencapaian ADIPURA KENCANA.
2. Penataan dan pengaturan pusat-pusat perbelanjaan seperti Pasar Sidoharjo, Pasar Lamongan Baru dan Pusat Perbelanjaan (Plaza) serta kemungkinan pengembangan pasar ikan dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Penataan dan pengaturan Pusat perbelanjaan tetap berpegang pada program semula yaitu Pasar Sidoharjo sebagai Pasar Basah/tradisional, sedang Pasar Lamongan Baru sebagai Pasar Kering terdiri dari barang-barang konveksi, kain serta barang-barang kelontong. Adapun Pusat Perbelanjaan Kota Lamongan (Plaza) dimaksudkan sebagai upaya penataan Kota khususnya dikawasan Pusat Perdagangan yang lebih representatif menyesuaikan perkembangan yang ada, sehingga tidak hanya masalah penataan kota yang lebih indah dan tertib tetapi juga mampu menyediakan prasarana kegiatan perdagangan yang lebih baik.
  - b. Terhadap kemungkinan pengembangan Pasar Ikan sedang diadakan penelitian untuk rencana perluasan mengantisipasi semakin berkembangnya Pasar Ikan tersebut.
  - c. Penambahan secara bertahap terhadap lampu penerangan jalan disekitar Pasar Sidoharjo sebelah barat dan Pasar dalam Kota Lamongan termasuk penyediaan sarana dan prasarana sanitasi sudah menjadi program Eksekutif Tahun Anggaran 1998/1999.

Hal ini juga dalam mewujudkan terciptanya lingkungan Pasar yang bersih dan teratur sekaligus mempersiapkan penilaian ADIPURA KENCANA Tahun 1998.

### **SUB SEKTOR PENGEMBANGAN USAHA DAERAH**

1. Terima kasih atas usul Yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan terhadap pengembangan Usaha Daerah melalui Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya didalam mengantisipasi dibukanya koridor utara sebagai lokasi atau kawasan industri.

Dalam upaya tersebut pihak eksekutif telah mengambil langkah-langkah dengan menawarkan pada pihak swasta atau konsorsium, akan tetapi didalam merealisasikan pemanfaatan kawasan industri tersebut tetap akan melibatkan/kerjasama dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya.

Selanjutnya terhadap usulan ini Pihak Eksekutif telah merencanakan suatu langkah, bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang ada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan direncanakan akan disertifikatkan menjadi

hak pengelolaan (HPI). Hal ini dikandung maksud untuk memudahkan para Investor menggunakan tanah-tanah yang akan dipakai guna pengembangan usahanya, misalnya Sektor Industri diberikan Hak Guna Bangunan (HGB), sedangkan untuk penanganannya akan ditangani oleh Bidang Properti dan Konsultan pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya.

2. Dalam rangka operasional Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya dimaksud, disampaikan terima kasih kepada Fraksi Karya Pembangunan hal tersebut sudah barang tentu Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya akan terus meningkatkan modalnya untuk bekerja sama dengan Pihak Ketiga/Investor yang dapat menguntungkan dan meningkatkan Perusahaan Daerah.

Selanjutnya dalam rangka mengantisipasi munculnya Perusahaan Konsorsium di Kabupaten Lamongan, maka Pihak Eksekutif telah mengadakan penelitian atau kajian terhadap bentuk-bentuk kerja sama usaha dengan melakukan studi banding ke Daerah lain, dan juga telah mempersiapkan struktur organisasi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

3. Sejalan dengan harapan yang terhormat Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia agar PD. BPR Bank Pasar Lamongan dalam operasionalnya dapat menjangkau pada seluruh pelosok pedesaan. Pihak Eksekutif telah mengambil langkah-langkah dalam peningkatan pelayanan dengan jalan pada setiap Unit Pelayanan di instruksikan untuk membuka pos-pos pelayanan yang ditempatkan di Balai Desa.

Adapun sampai saat ini dari 22 Kantor Unit pelayanan telah membuka pos-pos pelayanan sejumlah 20 pos di desa-desa dan untuk selanjutnya terus dikembangkan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

## **SUB SEKTOR KEUANGAN DAERAH**

*Sidang Dewan Yang Terhormat,*

Sebagaimana kita maklumi bersama, bahwa Keuangan Daerah merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan oleh karena itu Pihak Eksekutif, sebagai mana saran dan harapan Dewan Yang Terhormat akan senantiasa melakukan upaya-upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

Upaya tersebut tidak saja berupa intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah, tetapi juga meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam rangka peningkatan pemberian Sumbangan dan Bantuan.

Pihak Eksekutif juga akan senantiasa meningkatkan evaluasi dan pengawasan terhadap seluruh sumber pendapatan asli daerah, baik dalam tahun 1996/1997 yang dapat memenuhi target, maupun yang tidak memenuhi target, dalam hal yang terakhir ini mungkin Pihak Eksekutif tidak dapat memenuhi harapan Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan, namun Pihak Eksekutif telah konsisten untuk berupaya secara optimal, sehingga terhadap jenis pajak dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya yang dalam tahun 1996/1997 tidak memenuhi target, tetap dianggarkan sama dalam target penerimaan tahun 1997/1998.

Seperti harapan dan saran Yang Terhormat Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pihak Eksekutif juga akan senantiasa tetap melakukan upaya penyempurnaan pemungutan pada dinas dan aparat pemungut dengan mendorong motivasi kerja secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat sehingga akan tumbuh dan berkembang kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan Keuangan Daerah.

Selanjutnya atas hasil pemantauan Yang Terhormat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia yang berkesimpulan bahwa masih banyak tanah-tanah Negara yang ditempati oleh masyarakat terutama dipinggir-pinggir ruas jalan PUD yang belum terjangkau Retribusi atau pembayaran sewa. Namun demikian perlu diketahui, bahwa dalam pengelolaan tanah-tanah Negara; terdapat empat jenis kewenangan yang terdiri dari :

- a. Tanah-tanah yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, misalnya tanah-tanah PJKA
- b. Tanah-tanah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur, misalnya tanah-tanah Solo Valley, dan tanah daerah milik jalan Bina Marga.
- c. Tanah-tanah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lamongan, misalnya tanah Kas Kelurahan.
- d. Tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa, misalnya Tanah Desa.

Sesuai dengan kewenangan di atas, maka masing-masing pengelola dapat memungut Retribusi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, sedangkan untuk tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lamongan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor : 5 tahun 1985 juncto Nomor : 11 tahun 1995, tentang pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Dengan demikian selain tanah-tanah yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah tidak berwenang mengelola atau memungut Retribusi/sewa.

Selanjutnya apabila menurut sinyalemen dari Yang Terhormat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tentang adanya oknum Perangkat Desa yang memanfaatkan kondisi, dengan menarik sewa tanah Negara dari masyarakat disampaikan terima kasih dan akan dilakukan penelitian dan penertiban sesuai dengan Peraturan yang ada.

#### **SUB SEKTOR KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL**

1. Pembangunan dan pengembangan Sektor Koperasi di Kabupaten Lamongan semakin hari semakin berkembang terbukti dengan bertumbuh kembangnya jumlah lembaga koperasi dan perkembangan tersebut per 31 Maret 1997 sebagai berikut :

Koperasi Unit Desa (KUD)	= 29 Koperasi
KUD Mandiri	= 27 Koperasi
KUD Calon Mandiri	= 2 Koperasi
Koperasi Pondok Pesantren	= 15 Koperasi
Koperasi Karyawan	= 11 Koperasi
KPRI (Koperasi Pegawai Negeri)	= 50 Koperasi
Koperasi ABRI	= 2 Koperasi
Koperasi Pasar	= 5 Koperasi
KSU (Kop.Serba Usaha)	= 9 Koperasi
KSP (Kop.Simpan Pinjam)	= 3 Koperasi
Koperasi Angkutan Darat	= 1 Koperasi

KBPR	= 3 Koperasi
Koperasi Wanita	= 2 Koperasi
Koperasi Veteran	= 1 Koperasi
Koperasi Wredatama	= 5 Koperasi
Koperasi Purnawirawan ABRI	= 1 Koperasi
Koperasi Pemuda	= 1 Koperasi
Koperasi Perdagangan Kecil	= 2 Koperasi
Koperasi Ternak	= 3 Koperasi
Koperasi Perikanan	= 2 Koperasi
KP-KUD	= 1 Koperasi
Koperasi TAMYAMSANG	= 1 Koperasi

Dari jumlah koperasi yang tersebut di atas diantaranya telah ada melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta sebagaimana harapan dari Yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan yaitu kerjasama dalam bidang pengelolaan, pembelian saham dan jaringan usaha lainnya.

Sebagai contoh yaitu :

1. KUD Mina Tani dengan Pabrik Rokok Sampoerna.
2. KUD Mina Tani dan KUD Tani Bahari dengan PT Boma Bisma Indra.
3. PT. Bank Bali dengan 10 Unit KUD yang tidak lama akan mendirikan BPR dengan nama BPR Bali Lamongan Mandiri.
4. PT. Bank Danamon dalam waktu dekat ini telah sepakat untuk menjalin kerjasama dengan 3 KUD (Mina Tani, Madu Ratna dan Tani Mulyo) dalam usaha simpan pinjam.
5. Kerjasama KUD dengan PT. PLN dalam usaha penarikan dan baca meter listrik.

Dilihat dari hal-hal tersebut diatas memang untuk mengadakan dan memanfaatkan suatu jasa profesional untuk mengelola suatu koperasi haruslah bertahap untuk merealisasikannya namun sebagai target motivasi untuk memanfaatkan tenaga profesional tersebut telah sejalan dengan Pihak Eksekutif.

2. Sejalan dengan semakin berkembang dan memasyarakat serta membumi disegala struktur lapisan masyarakat Kabupaten Lamongan, pada saat ini telah ditetapkan suatu jaringan Sistem Informasi Manajemen Koperasi (SIMAKOP) pada 3 Koperasi yaitu KUD Mina Tani, KPRI Senada dan Primkopad.

Berkaitan dengan perkembangan wahana koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Lamongan pihak pembina teknis perkoperasian dalam hal ini Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kabupaten Lamongan sejak 2 Tahun terakhir ini telah mengambil suatu kebijaksanaan untuk menempatkan kader-kader KPRI sebagai salah satu unsur Tim Manajemen (Pengurus) KUD di Kabupaten Lamongan dan hasil RAT Tahun Buku 1996 yang lalu 15 KUD di Kabupaten Lamongan telah ada unsur kader KPRI sebagai pengurus KUD tersebut.

3. Disampaikan terima kasih atas penghargaan Yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan terhadap kemitraan dengan pengusaha besar untuk ikut membangun perekonomian di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Kemitraan dengan pengusaha besar tersebut oleh Eksekutif telah dimulai dengan telah ditandatanganinya MOU tanggal 3 Mei 1997 antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan PT. Kertanegara Primajaya tentang program pembangunan Sub Sektor Peternakan melalui Peternakan Inti Rakyat (PIR) ayam potong dan sapi potong dan dengan PT. Gejayan Andi Mulya tentang program pemasaran hasil usaha tani buah-buahan khususnya pengelolaan pasca panen pisang Cavendish dan mangga.

Selanjutnya atas saran Yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan terhadap Program Kemitraan dengan pengusaha besar untuk dikembangkan, adalah telah sejalan dengan pemikiran Eksekutif, hal tersebut telah dilaksanakan oleh Eksekutif dengan program kerja sama koperasi Tamyamsa ig dengan pihak ketiga dalam mengembangkan pemasaran hasil-hasil proyek Tamyamsang.

4. Atas permohonan informasi dari Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan terhadap sub sektor koperasi, dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Jumlah KUD di Kabupaten Lamongan adalah sebanyak 29 buah dan seluruhnya telah mendapatkan pelatihan kepada pengurus, pengawas dan BPP-KUD melalui program pembinaan dan pengembangan koperasi.
- b. Kendala yang dihadapi oleh KUD Mandiri khususnya tunggakan kredit program, penyelesaiannya diadakan pembenahan dan pengawasan juga telah dibentuk Surat Keputusan Bupati tentang pembayaran kredit program yang selanjutnya akan dibentuk Tim Gabungan antara benah dengan penuntasan yang dilaksanakan dengan penagihan ke lapangan.
- c. Pelayanan kepada anggota KUD telah dilaksanakan dengan mendirikan TPK (Tempat Pelayanan Koperasi) di wilayah kerja masing-masing KUD dan jumlah TPK tersebut di Kabupaten Lamongan telah mencapai sebanyak 331 unit.  
Adapun Fungsi TPK tersebut untuk melayani segala aktifitas kebutuhan dari para anggota terutama dalam hal sarana produksi pertanian serta jasa.
- d. Dalam musim pengadaan pangan MP 1997 sekarang ini KUD telah membeli hasil produksi pangan dari petani/anggota KUD berupa beras dan soal harga berpedoman kepada harga yang telah ditetapkan oleh BULOG.
- e. Program terobosan yang telah dilakukan KUD dalam pola kerjasama dengan kelompok tani pada program :

- Pengadaan pangan.

Pihak KUD telah melaksanakan jalinan kerjasama dengan kelompok tani dan terbukti KUD telah membeli hasil produksi pertanian tanaman pangan (beras) petani yang tergabung dalam kelompok tani.

Pada pengadaan pangan MP 1997 ini KUD yang melaksanakan pengadaan pangan ini sebanyak 11 KUD dengan nilai tonase sebesar 12.548.674 ton (per 31 Maret 1997), sedangkan untuk Kabupaten Lamongan ditargetkan untuk penjualan ke Dolog sebesar 8.500 ton berarti melampaui dari yang ditargetkan sebesar 4.049.674 ton atau sebesar 32,26 %.

- Pengadaan Barang dan Sembilan Bahan Pokok.

Dalam hal ini pihak KUD telah mendirikan Waserda/Pertokoan serta TPK di wilayah kerja masing-masing dan jalinan kerjasamanya yaitu berupa penitipan dan pemesanan bagi kebutuhan kelompok-kelompok tani yang bersangkutan dan jalinan kerjasama ini semakin hari semakin berkembang dengan nilai transaksi (volume usaha) sebesar Rp.134.481.067,- (per 31 Maret 1997).

- Pengadaan Sapropdi dan peralatan pertanian.

Dalam pengadaan tersebut KUD juga telah pula melakukan suatu terobosan pengadaan barang/peralatan pertanian berupa Hand Spayer (alat penyemprot hama) dengan cara kerja sama jual beli tunai atau kredit. Terkait dengan hal ini pihak KUD juga siap menampung untuk menerima pesanan peralatan pertanian dari petani/kelompok tani yang membutuhkan.

## **VI. SEKTOR TRANSPORTASI**

### **SUB SEKTOR PRASARANA JALAN**

Atas permohonan penjelasan, harapan dan himbauan Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan terhadap Sub Sektor ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa penyelesaian pekerjaan Ring Road Deket-Sumargo, telah dapat dilaksanakan dan diselesaikan pada Tahun Anggaran 1996/1997, dan pada tahun ini dilaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan, yang sampai saat ini telah dapat diselesaikan 80%.  
Sedangkan untuk pembangunan Pos penjagaan dan palang pintu perlintasan Kereta Api beserta kelengkapannya akan dibangun kemudian setelah pekerjaan pembangunan Jembatan selesai.
2. Adapun pandangan Yang Terhormat Fraksi Persatuan pembangunan tentang adanya perencanaan pelebaran jalan menuju ke Makam Raden Rahmad Sendang Duwur Paciran telah menjadi program Eksekutif yang akan datang dan diusulkan melalui Rapat Koordinasi Pembangunan (RAKORBANG) Tahun 1998/1999 dengan prioritas pembebasan Tanah dan Bangunan, mengingat lebar jalan yang ada sangat sempit yaitu hanya 4 Meter.
3. Pada dasarnya semua jenis Angkutan Pedesaan yang ada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sudah ditetapkan dengan jaringan trayek, maka secara otomatis jenis-jenis Angkutan Pedesaan tersebut sudah masuk di pangkalan-pangkalan parkir yang telah disediakan pada sepanjang jalur tersebut.  
Untuk lebih meningkatkan jasa umum transportasi serta penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan pengkajian pengalihan status dari Pangkalan Parkir menjadi Terminal Angkutan Orang type C.  
Upaya yang dilakukan adalah Optimalisasi pelaksanaan tugas lapangan, baik pengawasan dan pengendalian secara terpadu dengan instansi terkait akan ditingkatkan.  
Angkutan pedesaan Lyn : Babat - Ngimbang telah masuk pangkalan parkir Ngimbang.  
Angkutan pedesaan Lyn : Pucuk - Laren - Blimbing telah masuk di pangkalan parkir Pucuk.  
Angkutan pedesaan Lyn : Sukodadi - Karanggeneng - Banjarwati - Tanjungkodok telah masuk dipangkalan parkir pertigaan Sukodadi.

Angkutan pedesaan Lyn : Lamongan - Tikung - Mantup - Babatan dan Lamongan - Tikung-Kembangbahu - Gondang, masuk di pangkalan Parkir Pasar Sidoharjo.

Angkutan pedesaan Lyn : Lamongan - Sugio - Kedungpring dan Lamongan - Deket - Karangbinangun - Glagah masuk terminal Lamongan.

Untuk pangkalan parkir yang ada di Jalan Kusuma Bangsa, telah beralih status dari pangkalan parkir angkutan orang menjadi pangkalan parkir angkutan barang/cargo terminal.

4. Tentang pelaksanaan pembebasan tanah dan bangunan terhadap proyek pelebaran jalan Gresik-Lamongan-Widang dapat dijelaskan
  - a) Bahwa dalam tahap awal (Tahun Anggaran 1996/1997) pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk keperluan proyek pelebaran jalan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan penyelesaiannya telah mencapai 67,6%.
  - b) Jumlah pemilik tanah, bangunan maupun tanaman yang telah direalisasi mencakup 2.296 orang menerima ganti rugi (1.741 bidang) dengan luas  $\pm$  523.364 M<sup>2</sup> dengan ganti rugi yang telah diterimakan sejumlah Rp. 15.290.698.590,00.  
Yang masih dalam proses penyelesaian, meliputi 638 orang (249 bidang) dengan luas tanah  $\pm$  42.651 M<sup>2</sup> dengan perkiraan dana  $\pm$  7 Milyar 307 Juta 595 Ribu 67 Rupiah.
  - c) Jumlah tempat-tempat ibadah serta tempat-tempat pendidikan yang terkena proyek pelebaran jalan Koridor meliputi : 13 Masjid atau Musholla dan 20 tempat pendidikan.
  - d) Proses penyelesaiannya (dalam penerimaan uang ganti rugi)
    - 1) Terhadap tempat-tempat ibadah diterimakan kepada Pengurus atau Ta'mir.
    - 2) Terhadap tempat-tempat pendidikan diterimakan kepada Instansi yang berwenang menerima.
  - e) Jumlah plafond dana tahap awal (Tahun Anggaran 1996/1997) sebesar Rp. 22.598.293.659,00.
  - f) Kelanjutan tahap kedua akan diselesaikan dalam Tahun Anggaran 1997/1998.

## **VII. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

### **SUB SEKTOR ENERGI/LISTRIK PEDESAAN**

Disampaikan terimakasih atas perhatian dari Yang Terhormat Fraksi Karya Pembangunan terhadap Program Listrik Masuk Desa di Wilayah Daerah Tingkat II Lamongan.

Sebagaimana diketahui bahwa Program Listrik Masuk Desa membutuhkan dana yang besar dan program ini dilaksanakan mulai dari pangkal dan berlanjut ke ujung.

Dengan demikian program tersebut merupakan program yang dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut.

Adapun mengenai Listrik Desa Girik dan Desa Tlemang Kecamatan Ngimbang adalah sesuai Program Listrik Desa di PT. PLN Cabang Bojonegoro dan masuk Tahun Anggaran 1997/1998. Dengan demikian untuk Triwulan I baru dapat dilaksanakan tiang listriknnya, sedangkan Triwulan II mulai pelaksanaan tender pemasangan jaringan. Selanjutnya mengenai cara pembayaran pemasangan dengan sistem angsuran melalui perbankan, hal tersebut akan kami upayakan.

## **VIII. SEKTOR PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI DAERAH**

### **SUB SEKTOR PARIWISATA**

Saran, himbauan dan harapan Yang Terhormat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tentang Sub Sektor ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terhadap Pihak Ketiga atau Swasta yang diundang untuk menanamkan investasinya dalam pengembangan sarana dan prasarana penunjang obyek-obyek wisata di Kabupaten Lamongan, Pihak Eksekutif telah berupaya untuk mendorong supaya investor dapat menanamkan modalnya dalam rangka kerjasama untuk melengkapi fisik dan prasarana di obyek wisata Goa Maharani dan Situs Sunan Drajad di Kecamatan Paciran.

Semua investor yang masuk perlu diadakan pengkajian yang dalam dan memerlukan waktu, karena dengan adanya investor yang bekerjasama ini harus mempunyai nilai tambah dari yang sebelumnya.

2. Pelaksanaan pelayanan terhadap para pengunjung di Wisata Goa Maharani dan Situs Sunan Drajad ditangani sebanyak 36 orang, yang terdiri dari 2 orang Pegawai Negeri, 22 orang Tenaga Kontrak Pemda Tingkat II Lamongan dan 12 orang dibantu dari Tenaga Desa Drajad Kecamatan Paciran. Dari 36 orang tersebut, sistem yang dilaksanakan yaitu melalui shif/giliran dan hal ini sudah dilaksanakan dengan baik.

3. Personalia yang berstatus Pegawai Honorer sudah tidak ada, yang ada Tenaga Kontrak Kerja.

Pegawai yang berstatus Tenaga Kontrak Kerja sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan dengan yang bersangkutan tidak memberikan jaminan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Adapun untuk proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan tetap berpedoman pada Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 05/SE/76, yang proses pengadaannya menjadi kewenangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

4. Sehubungan dengan pedagang kaki lima yang berada di luar lokasi Goa Maharani (di sepanjang jalan raya dekat pintu masuk Goa Maharani), Pihak Eksekutif sudah berupaya untuk menertibkan, namun jumlah pedagang kaki lima setiap saat selalu bertambah, sehingga perlu pemikiran bersama untuk menampung pedagang kaki lima terutama menyangkut tata ruang, lokasi dan pendanaan.
5. Tentang penambahan sarana dan prasarana mainan anak-anak dan perencanaan pembuatan Kebun Binatang Mini, berdasarkan hasil pemantauan/survey di lapangan bersama Bappeda dan Para Group serta Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Lamongan akan direncanakan pembangunan di kawasan obyek wisata Goa Maharani dan Tanjung Kodok secara terpadu, sesuai ijin persetujuan prinsip pengembangan dan pembangunan kawasan wisata di Pantai Utara Lamongan oleh Dirut Para Jatim Propertindo Nomor : 050/177/410.101/1997 guna menarik para wisatawan.

6. Mengenai penyediaan air bersih di Makam Sunan Drajad dan Sendang Duwur, menjadi perhatian Eksekutif.

Namun perlu diinformasikan bahwa dalam melayani masyarakat peziarah ke Situs Sunan Drajad dan Sendang Duwur, selama ini para peziarah menggunakan air dari dalam tanah (sumur).

#### **SUB SEKTOR TELEKOMUNIKASI DAERAH**

Permohonan penjelasan Yang Terhormat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tentang jaringan/pemasangan telepon di wilayah Kecamatan Bluluk, disampaikan bahwa jaringan pesawat telepon untuk wilayah Kecamatan Bluluk saat ini sudah selesai, sedangkan berfungsinya sarana komunikasi tersebut tinggal menunggu dropping pesawat teleponnya dari Kantor Telepon Pusat. Adapun saat sekarang yang sudah berfungsi adalah khusus untuk Fasilitas Telepon Pemilu yaitu Kantor Camat, Koramil dan Polsek.

### **IX. SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAHRAGA.**

#### **SUB SEKTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA.**

Himbauan Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan terhadap Sub Sektor ini dapat dijelaskan bahwa untuk pembinaan pemuda utamanya yang terhimpun dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) telah diadakan pembinaan secara organisatoris melalui Musda/Muscabda/Rakerda/Rakercab dengan kegiatan pembinaan pendidikan politik generasi muda, adapun untuk pembinaan para Remaja adalah melalui Badan Penanggulangan Kenakalan Remaja (BAPENKAR).

## **X. SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PERAN - AN WANITA, ANAK DAN REMAJA**

### **SUB SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Harapan Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan agar Kabupaten Lamongan sedikit demi sedikit dapat terbebas dari praktek-praktek Wanita Tuna Susila (WTS), Hal ini telah sesuai dengan pemikiran Eksekutif.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Aparatur Pemerintah untuk menghapuskan praktek-praktek WTS liar telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 430 Tahun 1992 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Wanita Tuna Susila dan surat-surat penekanan kepada Camat yang wilayahnya terdapat warung yang dihuni WTS liar agar mengadakan operasi pemberantasan WTS secara periodik sesuai dengan Surat Keputusan tersebut. Dan bilamana para Germo/ Mucikari dan WTS masih membuka praktek prostitusi kembali akan dikenakan sanksi lebih berat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 Tahun 1968.

Adapun kesiapan Aparatur Pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan Aparat Desa yang wilayah desanya terdapat praktek-praktek WTS liar dalam upaya menghapuskan praktek-praktek tersebut sudah dilakukan baik berupa himbauan dan petunjuk/langkah-langkah dalam pengawasannya, kegiatan operasi serta pemantauan terhadap lokasi-lokasi yang diduga untuk praktek WTS.

## **XI. SEKTOR APARATUR PEMERINTAH DAN PENGAWASAN**

### **SUB SEKTOR APARATUR PEMERINTAH**

#### **1. Tentang Tanah Kas Desa.**

Terima kasih atas harapan dari Yang Terhormat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia agar ada perhatian yang lebih khusus dari Pemerintah Daerah terhadap desa-desa yang tanah kas desanya kurang subur dan luasnya dibawah 1 (satu) Ha., hal ini sudah menjadi program Eksekutif.

Sebagai informasi dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Pada tahun Anggaran 1995/1996 telah memberikan bantuan pengadaan Tanah Kas Desa dengan dana dari APBD Tingkat I sebesar 52 Juta 500 Ribu Rupiah untuk 3 (tiga) Desa sesuai dengan skala prioritas, yakni :

- 1) Desa Kedungbanjar Kecamatan Sambeng seluas 1,9070 Ha.
- 2) Desa Solokuro Kecamatan Solokuro seluas 0,5065 Ha.
- 3) Desa Pangkatrejo Kecamatan Sekaran seluas 0,4455 Ha.

b. Sedangkan untuk tahun anggaran 1996/1997 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tidak mendapatkan bantuan pengadaan tanah kas desa, mengingat alokasinya oleh Tingkat I Jawa Timur dilakukan secara bergilir untuk Kabupaten di Jawa Timur.

c. Adapun untuk bantuan pengadaan Tanah Kas Desa yang berasal dari APBD Tingkat II Lamongan akan diprogramkan secara bertahap.

2. Permintaan penjelasan dari Yang Terhormat Fraksi Persatuan Pembangunan, yang berkaitan dengan realisasi dana untuk proyek pendidikan Aparatur Daerah sebesar Rp. 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dapat dijelaskan penggunaannya sebagai berikut :

- a. Diklat Luar Negeri (LN) 1 orang
- b. Diklat Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama (SPAMA) 2 orang.
- c. Diklat Administrasi Umum Lanjutan (ADUMLA) 36 orang.
- d. Diklat Administrasi Umum (ADUM) 40 orang.
- e. Kursus Bendaharawan Daerah (KBD) 40 orang.
- f. Kursus Manajemen Proyek (KMP) 40 orang.

Sedangkan mengenai pelaksanaan dari proyek Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) sebesar 20 Juta Rupiah dipergunakan untuk :

- a. Pemantapan Tata Naskah Dinas Sekolah Dasar Se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang diikuti oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor : 101 tahun 1995.
- b. Bimbingan teknis pengolahan data pelatihan komputer di Lingkungan Setwilda dan Dinas Tingkat II Lamongan.
- c. Analisa Jabatan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- d. Peningkatan kemampuan personil dan pembinaan secara langsung di bidang kearsipan pada Kantor Pembantu Bupati, Kecamatan dan Dinas-dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Selanjutnya sudah barang tentu dengan pelaksanaan kedua proyek tersebut akan meningkatkan terwujudnya dukungan administrasi Pemerintah yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi serta langkah-langkah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, serta pembangunan aparatur pemerintah yang handal, profesional, efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi rakyat terhadap dinamika perubahan lingkungan.

## XII. SEKTOR LAIN-LAIN

1. Permohonan penjelasan Yang Terhormat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia terhadap Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Sukorame, ternyata belum tercatat dalam register permohonan Ijin Mendirikan Bangunan pada unit Samsat Perijinan Daerah.

Oleh karena itu disarankan agar kepada yang berkepentingan segera mengurus dan menanyakan kembali kepada oknum yang ditunjuk lembaga tersebut dalam pengajuan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan dimaksud.

Selanjutnya perlu diketahui, bahwa dalam memberikan pelayanan perijinan, Pihak Eksekutif melalui unit yang terkait senantiasa menerapkan prinsip terbuka, dalam arti siap memberikan informasi dan membantu mengatasi berbagai keluhan masyarakat dalam kaitannya dengan penerbitan perijinan.

2. Tentang permohonan penjelasan Akte Kelahiran untuk persyaratan pernikahan adalah sesuai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor : 393/1989 yang menentukan bagi calon mempelai berkewajiban memiliki Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir.

Adapun mengenai biaya penerbitan Akte Kelahiran yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 117 Tahun 1992 Jo Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1993 Jo. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 170 Tahun 1993 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kelahiran di bawah Tahun 1985 biaya Akte Kelahiran anak ke I dan ke II sebesar Rp. 6.500,00, anak ke III dan seterusnya Rp. 10.500,00.
- b. Kelahiran diatas tahun 1986 biaya anak ke I dan II sebesar Rp. 9.500,00, anak ke III dan seterusnya Rp. 13.500,00.

Dapat disampaikan bahwa untuk memperoleh Akte Kelahiran tersebut diperlukan beberapa persyaratan Administratif yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan tidak menutup kemungkinan untuk memperoleh persyaratan tersebut masih terdapat biaya-biaya sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku, seperti misalnya :

- 1) Surat keterangan Kelahiran dari Kepala Desa, bisa dikenakan biaya administrasi menurut Keputusan Desa setempat.
- 2) Surat keterangan kelahiran dari Camat akan di pungut biaya leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1993.
- 3) Legalisasi Surat Nikah orang tua, akan dikenakan biaya leges oleh Pejabat yang berwenang. Belum lagi apabila harus meminta duplikat Surat Nikah orang tua apabila Surat Nikah orang tuanya tersebut tidak ada.

Perlu disampaikan bahwa untuk penyelesaian Akte Kelahiran di Kantor Catatan Sipil adalah yang bersangkutan datang ke Kantor Catatan Sipil sendiri dengan membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Tetapi apabila yang bersangkutan tidak dapat mengurus sendiri dapat menguasakan kepada orang lain dengan surat kuasa yang diketahui oleh Kepala Desa setempat.

Oleh karena itu melalui forum yang terhormat ini, Pihak Eksekutif menghimbau agar masyarakat yang berkepentingan membutuhkan pelayanan Akte Kelahiran hendaknya datang sendiri ke Kantor Catatan Sipil.

Selanjutnya terhadap sinyalemen, mengenai keterlambatan penerbitan Akte Kelahiran di Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang, agar supaya yang bersangkutan menanyakan kepada siapa yang diberi kuasa mengurusnya.

3. Kami sependapat dengan himbauan dan saran dari Yang Terhormat Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia agar aset Pemerintah Daerah yang berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) harus semaksimal mungkin dapat dipertahankan dalam kondisi siap pakai untuk tugas-tugas operasional dalam mendukung tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan.  
Terhadap kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang pengadaannya tahun 1985 dan tahun-tahun sebelumnya serta penggunaannya sudah tidak efektif dan efisien, akan kami proses penghapusannya sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap kelancaran pelaksanaan tugas instansi pemakai kendaraan yang bersangkutan.
4. Saran dari Yang Terhormat Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia agar pelaksanaan proyek-proyek yang ada kaitannya dengan galian pembongkaran jalan-jalan atau sarana dan prasarana umum baik terhadap galian PDAM dan Telkom agar dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya disampaikan terima kasih. Bahkan hal tersebut sudah kami tindak lanjuti lewat Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) pada tanggal 23 April 1997 di Pendopo Lokatantra bahwa pada tiap-tiap Instansi, Dinas, Bagian di Wilayah Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan agar menyampaikan program-programnya untuk Tahun Anggaran 1997/1998 dengan tujuan agar kegiatan proyek bisa terpadu dan terkoordinasi dengan baik, namun pada realisasi pelaksanaan penggalian kabel Telepon dan pipa PDAM turunnya pelaksanaan proyek terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan.
5. Disampaikan terima kasih kepada Yang Terhormat Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menghimbau agar masa-masa Kampanye ini semua pihak dapat mengendalikan diri sedemikian rupa sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pelaksanaan Kampanye yang dimulai pada tanggal 27 April 1997 dan yang akan berakhir besok pada tanggal 23 Mei 1997 mendatang, saat ini telah sampai pada putaran ke 6 (enam), hari ke 17, pelaksanaannya telah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kampanye Pemilu 1997 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampanye, disamping itu mendasari Pasal 10 ayat 1 dan pasal 17 Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kampanye Pemilu 1997, di Kabupaten Lamongan telah tercetus kesepakatan bersama antara ketiga Organisasi Peserta Pemilu (PPP, Golkar dan PDI) yang ditandatangani pada tanggal 17 April 1997 yang intinya : "Ketiga Organisasi Peserta Pemilu siap mensukseskan dan melaksanakan Kampanye sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kesepakatan Nasional dengan tetap memelihara ketertiban, keamanan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Pelaksanaan Kampanye oleh ketiga Organisasi Peserta Pemilu di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan berjalan cukup tertib, lancar, aman, dan terkendali.

Namun demikian pihak Eksekutif mengharapkan kepada ketiga Organisasi Peserta Pemilu untuk putaran Kampanye berikutnya agar tetap mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan bersama oleh ketiga Organisasi Peserta Pemilu.

## PENUTUP

*Saudara Pimpinan Sidang Yang Terhormat,*

Demikianlah keseluruhan jawaban dan penjelasan Pihak Eksekutif atas Pemandangan Umum oleh Fraksi-fraksi Dewan Yang Terhormat yang disampaikan pada Sidang Paripurna I Tahun Sidang 1997/1998 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan pada tanggal 7 Mei 1997 yang baru lalu.

Hendaknya dimaklumi, bahwa jawaban yang saya sampaikan pada kesempatan ini merupakan cermin dari beberapa sikap dan harapan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh pihak Eksekutif dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien menuju pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta meningkatkan pelayanan masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Sudah barang tentu pihak Eksekutif di dalam memberikan tanggapan, jawaban dan penjelasan tadi telah berusaha sebaik-baiknya untuk dapat mencakup semua permasalahan-permasalahan yang dikemukakan oleh Fraksi Dewan yang terhormat, namun demikian manakala dalam jawaban yang telah saya sampaikan itu dirasa masih terdapat hal-hal yang perlu diserasikan kiranya dapat diselesaikan melalui musyawarah yang diliputi semangat kekeluargaan dan kebersamaan.

Kiranya perlu difahami, bahwa penegasan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, menghendaki kita semua untuk menegakkan dan melestarikan mekanisme demokrasi Pancasila yang kita anut bersama-sama agar semakin tumbuh dan berkembang didalam setiap tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam Demokrasi Pancasila yang memiliki norma-norma dasar dan asas-asas seperti yang terkandung didalam pembukaan serta batang tubuh Undang-undang Dasar 1945, telah memberikan tuntunan kepada kita bahwa didalam melaksanakan kedaulatan rakyat harus didasarkan kepada "hikmat kebijaksanaan" yang merupakan perpaduan cipta, rasa dan karsa

yang bersumber dari keseluruhan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Sehingga dengan demikian segala wujud yang dihasilkan akan dapat bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

*Saudara pimpinan dan sidang Dewan yang terhormat,*

Selanjutnya sebagai bagian akhir dari jawaban Eksekutif ini perkenankanlah saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jamaah haji di Kabupaten Lamongan khususnya para anggota Dewan yang alhamdulillah sampai dengan saat ini dari 1.028 jamaah haji yang menuju ke tanah suci, 1.026 jamaah haji telah tiba di tanah air, sedangkan 1 orang masih tinggal karena sakit dan 1 jamaah meninggal di tanah suci. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang telah dijalankan tersebut menjadi amalan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wata'ala dan diterima ibadah hajinya sebagai haji yang mabrur.

Pada akhirnya saya serahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Saudara Pimpinan Dewan Yang Terhormat untuk memperoleh tindak lanjut didalam pemrosesan Rancangan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1996/1997.

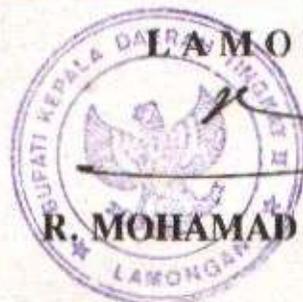
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian.

Sekian terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.*

Lamongan, 13 Mei 1997

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II**



**R. MOHAMAD FARIED, SH**